ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR INSURANCE POLICYHOLDERS AGAINST INSURANCE COMPANIES DECLARED BANKRUPT

Chyo Dwila Adha

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

chyodwilaadha@gmail.com

Mahlil Adriaman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

mahliladriaman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi akibat perusahaan asuransi yang mereka gunakan dinyatakan pailit. Maka untuk membatasi persoalan tersebut, dirumuskan lah permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, dan Bagaimana mekanisme pembayaran klaim pemegang polis asuransi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data sekunder yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang polis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layak ketika perusahaan asuransi yang mereka gunakan mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar OJK membentuk lembaga tersendiri dalam memberikan jaminan kepada pemegang polis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan.

Abstract

This research examines the legal protection given to insurance policyholders as a result of the insurance company they use being declared bankrupt. So to limit the problem, this problem is formulated with the formulation of the problem, namely: How is the legal protection for insurance policyholders against insurance companies declared bankrupt, and how is the mechanism for paying claims of insurance policyholders against companies declared bankrupt. This research uses a normative juridical approach and secondary data analysis related to legislation and legal theory. The results show that policyholders have the right to obtain fair and proper legal protection when the insurance company they use experiences bankruptcy. Therefore, the author suggests that OJK form a separate institution in providing guarantees to policyholders.

Keywords: Legal Protection, Policyholders, Bankrupt Insurance Companies.

A. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan di era modern ini, asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia untuk melindungi diri dari potensi kerugian di masa depan. Karena ketidakpastian risiko, banyak orang memilih untuk memindahkan risiko tersebut kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi. Meningkatnya jumlah orang yang memilih asuransi menunjukkan kepercayaan mereka terhadap lembaga ini sebagai alat untuk mengalihkan dan membagi risiko, yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat, perusahaan, dan pembangunan negara.¹

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara minimal 2 pihak di mana pihak yang menanggung berjanji kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, kehilangan potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung

akibat peristiwa yang tidak pasti. Asuransi juga penting untuk mengurangi dampak ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan akibat risiko. Dalam konteks asuransi, terdapat istilah Polis yang merupakan dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah). Polis ini merupakan dokumen penting yang mengatur kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.²

Perusahaan asuransi bergantung pada keberadaan pemegang polis (tertanggung) untuk dapat beroperasi, sehingga pemegang polis memiliki peran penting dalam perusahaan asuransi. Perusahaan di Indonesia khawatir tentang kemungkinan kepailitan atau keputusan pailit yang dapat merugikan perusahaan, termasuk perusahaan asuransi. Kepailitan merujuk pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditornya. Kondisi ketidakmampuan

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Cet. ke 5, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 1

² Sequis, "Polis Asuransi : Pengertian, Fungsi, dan Isi Polis", dalam <https://sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/polis-asuransi-pengertian-fungsi-dan-isi-polis> dikunjungi 31 Juli 2024.

untuk membayar ini sering kali disebabkan oleh masalah keuangan (financial distress) dan kegagalan usaha debitur.³

Adapun penyebab dari adanya kepailitan bagi suatu Perusahaan Asuransi diantaranya perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada debitor, yang mana hal ini disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang buruk, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para debitor. Dengan demikian, perusahaan asuransi dinyatakan pailit karena kekurangan dana untuk melunasi utang dan kewajiban lainnya, serta kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk beroperasi secara normal.

Meskipun tidak ada rincian spesifik tentang jumlah perusahaan asuransi yang telah mengalami kepailitan di Indonesia dalam sumber yang tersedia, terdapat beberapa perusahaan asuransi di Indonesia telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan

pengadilan niaga. Antara lain, PT Wataka General Insurance pada tahun 2000, PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife pada tahun 2001, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada tahun 2015, PT Asuransi Jiwa Nusantara pada tahun 2015, dan PT Asuransi Syariah Mubarakah pada tahun 2016. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan kepailitan beberapa perusahaan asuransi tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Selain mengawasi sektor asuransi, OJK juga bertanggung jawab untuk membangun sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Asuransi Kresna Life di Indonesia yang sebelumnya telah dicabut izin usahanya oleh OJK, namun kini sudah dinyatakan pailit karena tidak dapat memenuhi pembayaran klaim pada polis Kresna Link Investa (K-LITA). Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) adalah produk unit link yang menggabungkan asuransi jiwa untuk perlindungan kematian baik karena kecelakaan maupun alasan lain, serta investasi dengan masa perlindungan hingga 100 tahun

³ Titik Tejaningsih, " *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit*", (Yogyakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015), hlm. 1.

dan uang pertanggungan sebesar 25 juta rupiah. Namun, perusahaan asuransi jiwa Kresna mengalami kesulitan dalam membayar klaim karena masalah likuiditas yang dihadapi. Pada bulan Februari 2020, OJK menginstruksikan Kresna Life untuk menghentikan produk K-LITA guna mengurangi risiko kesulitan membayar klaim polis yang jatuh tempo, serta untuk melindungi kepentingan pemegang polis. Secara keseluruhan, terdapat 12.000 klaim polis senilai Rp 6,4 triliun yang harus diselesaikan oleh Kresna Life.

Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajiban kepada nasabah, yang kemudian memicu proses pailit dengan putusan pailit Mahkamah Agung (MA). Putusan ini tercantum dalam amar putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 pada tanggal 8 Juni 2021.

Keputusan pailit terhadap perusahaan asuransi akan berdampak pada pemegang polis asuransi, yang bertindak sebagai pihak yang mengalihkan risiko dan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Meskipun debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, undang-undang tetap melindungi para kreditur dengan memberikan pembagian hasil

penjualan aset debitur pailit berdasarkan jumlah utang yang dimiliki oleh masing-masing kreditur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

Kepailitan pada dasarnya adalah proses pembagian aset debitur kepada para krediturnya. Ini merupakan solusi untuk mendistribusikan aset debitur secara pasti dan adil, yang kemudian menjadi modal pailit. Dalam konteks perusahaan asuransi, pemegang polis adalah pihak yang paling dirugikan jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Melihat peran sentral pemegang polis dalam industri asuransi, perlindungan hukum bagi mereka menjadi sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jika perusahaan

asuransi dinyatakan pailit, dan bagaimana mekanisme pembayaran klaim pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi dinyatakan pailit

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma seperti keadilan, kepastian, ketertiban, efisiensi, dan otoritas hukum, serta doktrin dan norma hukum yang mendasari penerapan unsur-unsur tersebut dalam bidang hukum prosedural dan substantif, termasuk hukum publik seperti prinsip-prinsip dasar hukum dan undang-undang umum. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen hasil penelitian orang lain yang tersedia dalam buku, jurnal, dan termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Data sekunder terdiri dari buku dan jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen yang

kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang dibahas.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank, yang umumnya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Lembaga keuangan non-bank di Indonesia meliputi pasar modal, asuransi, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan lainnya. Perusahaan asuransi adalah entitas yang berfokus pada bidang asuransi, di mana terdapat kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sebagai pihak tertanggung, seseorang diwajibkan membayar premi kepada penanggung untuk mendapatkan kompensasi atas risiko keuangan yang mungkin terjadi di luar perkiraan. Jika terjadi suatu kejadian yang tidak diharapkan, sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi, pemegang polis dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan persyaratan yang telah

disepakati bersama perusahaan asuransi.⁴

Di Indonesia Asuransi Kresna Life yang sebelumnya dicabut izin usahanya oleh OJK, namun saat ini sudah dipailitkan karena gagal bayar pada polis Kresna Link Investa (K-LITA). Kresna Life harus membayar 12.000 klaim polis dengan total nilai Rp 6,4 triliun.

Dampaknya adalah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah, sehingga menyebabkan proses pailit dengan keputusan pailit dari Mahkamah Agung (MA). Keputusan ini dicatat dalam amar putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 pada tanggal 8 Juni 2021. Dalam situasi kepailitan PT Asuransi Jiwa Kresna, nasabah menjadi khawatir tentang kemungkinan klaim asuransi tidak terpenuhi ketika perusahaan mengalami kegagalan pembayaran, terutama setelah OJK tidak mengajukan permohonan PKPU sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran lebih

lanjut bagi pemegang polis terkait dengan kepastian pemenuhan hak nasabah yang tercatat di PT. Asuransi Jiwa Krisna.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), terdapat tiga kategori kreditor, yaitu :⁵

- a. Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atau prioritas dalam penyelesaian utang mereka, memungkinkan mereka untuk diberi prioritas dalam pembayaran utang karena memiliki hak istimewa yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya berdasarkan jenis piutang yang dimiliki. Hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor sehingga posisinya lebih tinggi dari yang lainnya.
- b. Kreditor separatis merupakan pihak kreditor tertinggi yang

⁴ Ferial Fatimah, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit", *NOTARIUS*, Vol.14 No. 2, hlm. 827.

⁵ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan. Mereka setuju bahwa kreditor separatis ini adalah kreditor yang memiliki klaim atas debitur yang dijamin dengan jaminan kebendaan seperti gadai atau hak tanggungan.

- c. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan tetapi berhak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian tertentu. Namun, ketika utang dilunasi, kreditor konkuren akan menerima pembayaran terakhir setelah kreditor preferen dan kreditor separatis menerima pembayaran klaim mereka.

Permasalahan antara PT. Asuransi Jiwa Kresna dan para pemegang polis memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis. Penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari perlindungan hukum adalah melindungi hak-hak masyarakat yang mungkin terkena

kerugian dari pihak lain, sehingga mereka dapat kembali menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Secara umum, ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.⁶

Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dan mengatur pelaksanaan kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah metode hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran yang telah terjadi.

Dalam upaya pencegahan, pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna telah diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dalam KUHPperdata, UU Perasuransian, serta UU Kepailitan dan PKPU. Regulasi yang berlaku mengatur status hukum pemegang polis dalam skenario kebangkrutan perusahaan asuransi atau proses PKPU. Menurut Pasal 52 UU Perasuransian, pemegang polis dijamin prioritas yang lebih tinggi daripada pihak lain dalam kasus

⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm.2.

kebangkrutan perusahaan asuransi. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak istimewa memberikan kreditor posisi yang lebih tinggi dari kreditor lainnya. Dengan demikian, pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna dianggap sebagai kreditor preferen, yang berarti undang-undang menjamin bahwa mereka akan menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum kreditor lainnya. Dalam konteks kasus Asuransi Jiwa Kresna, pemegang polis juga dapat menerima bentuk perlindungan hukum represif melalui penyelesaian perselisihan di luar jalur peradilan atau melalui proses hukum. Prosedur penyelesaian yang ada bisa menjadi pilihan alternatif yang dipilih oleh pemegang polis untuk memastikan pelunasan utang mereka setelah keputusan kasasi oleh Mahkamah Agung.⁷

Penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dapat dilakukan

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dan Arbitrase. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan wanprestasi, gugatan sederhana (small claim), mediasi di pengadilan, serta permohonan kepailitan atau PKPU.

2. Mekanisme Pembayaran Klaim Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit

Berkaitan dengan utang dan piutang, baik kreditor maupun debitor memiliki tanggung jawab dan hak berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak terkait atau yang diatur oleh undang-undang.⁸

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa jika perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalami kebangkrutan, pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi dari perusahaan

⁷Utiyafina Mardhati Hazhin, Marchety Riwani Diaz, Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi, *NEGARA HUKUM*, Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 218.

⁸Gatot Supramono, "*Perjanjian Utang-Piutang*," (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 10.

tersebut berhak mendapatkan bagian dari harta kekayaan yang dilikuidasi dan memiliki prioritas tertinggi dibandingkan dengan pihak lain.

Berkenaan dengan kasus Kresna Life, terdapat beberapa mekanisme pembayaran klaim asuransi yang dilakukan, diantaranya:

- a. Pada tanggal 10 Desember 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna sedang mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ini artinya perusahaan diberi kesempatan untuk menyelesaikan utang kepada nasabah tanpa harus melalui proses pailit yang rumit dan memakan waktu.
- b. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dengan menetapkan aturan tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan khusus. OJK telah memberlakukan kebijakan kepada perusahaan asuransi Kresna Life untuk memastikan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak nasabah sesuai rencana perdamaian untuk membayar klaim nasabah yang sedang berlangsung atau telah jatuh tempo. Tindakan ini menegaskan bahwa kepentingan nasabah asuransi diprioritaskan dalam penyelesaian klaim mereka yang diawasi ketat oleh OJK. OJK melakukan pengawasan yang teliti terhadap perusahaan untuk memastikan pembayaran utang kepada nasabah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, OJK meminta pemegang saham pengendali dan direksi untuk mengkompensasi kerugian nasabah melalui escrow account sebagai bukti komitmen dalam mengembalikan dana nasabah.
- c. Perusahaan wajib menuntaskan semua utang dalam waktu maksimal 4 bulan setelah tanggal persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha.

Selama periode ini, perusahaan wajib mengontrak akuntan publik untuk menyusun laporan keuangan akhir dan melakukan verifikasi guna memastikan pembayaran utang kepada nasabah terpenuhi. Penyelesaian utang perusahaan kepada semua Pemegang Polis tidak boleh mengurangi atau merugikan hak nasabah Kresna Life. Penyelesaian kewajiban terhadap nasabah Kresna Life dapat dilakukan dengan mentransfer portofolio asuransi ke perusahaan lain atau mengembalikan hak pemegang polis. Jika pemegang polis menolak pengalihan asuransinya, pertanggungjanaan akan berakhir dan perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis.⁹

- d. Pada tanggal 18 Februari 2021, dilakukan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang mengakibatkan semua keputusan *judex factie* dalam kasus ini dinyatakan tidak berlaku, sehingga Kresna Life dikembalikan ke keadaan

sebelum keputusan PKPU dan homologasi.

Analisis

Asuransi merupakan institusi keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki sejumlah tugas dan wewenang terkait dengan situasi kepailitan perusahaan asuransi, termasuk:

1. Mengawasi Jalannya Kepailitan:

OJK bertindak sebagai pengawas dalam proses kepailitan perusahaan asuransi, memastikan bahwa proses likuidasi berjalan dengan baik dan semua kewajiban perusahaan terlunasi.

2. Mengajukan Permohonan Pailit:

OJK, lewat Dewan Komisiner, memiliki hak untuk mengusulkan permohonan deklarasi pailit terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Langkah ini diambil guna melindungi kepentingan pemegang polis asuransi dan memastikan pembayaran utang perusahaan kepada para kreditornya.

3. Pengaturan dan Pengawasan:

⁹Dede, 2018: Hlm.150.

OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas bisnis asuransi, termasuk memberlakukan sanksi berupa pembatasan aktivitas bisnis bagi perusahaan asuransi yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

4. Pembubaran dan Likuidasi:

OJK juga terlibat dalam proses pembubaran dan likuidasi perusahaan asuransi yang pailit. Mereka memastikan bahwa proses likuidasi dilakukan dengan transparan dan adil, serta memastikan bahwa semua aset perusahaan digunakan untuk melunasi utang.

Dengan demikian, OJK berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Selain dari beberapa tugas dan wewenang OJK dalam kepailitan perusahaan asuransi berdasarkan analisis penulis, ketika suatu perusahaan asuransi tidak lagi layak untuk operasional, sebaiknya perusahaan asuransi juga harus ada yang namanya lembaga

penjamin polis asuransi, sama halnya dengan bank ada yang namanya lembaga penjamin simpanan (LPS), yang menjamin simpanan para nasabahnya, karena ketika ada lembaga yang menjamin, maka lembaga inilah yang nantinya akan mengembalikan hak-hak pemegang polis tersebut. Dengan adanya lembaga yang menjamin ini, ada pertanggung jawaban dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dengan mengikutkan lembaganya dibawah naungan lembaga penjamin polis asuransi, dan juga tidak perlu adanya peran kurator karena sudah ada proses berjalan yang menjamin hak pemegang polis tersebut.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang pailit dijamin dalam berbagai undang-undang, dan nasabah Kresna Life juga dapat dilindungi melalui upaya hukum preventif dan represif.

Untuk mekanisme pembayaran klaim asuransi terhadap Perusahaan asuransi yang pailit dapat dilakukan dengan

melibatkan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengawasan OJK, penyelesaian kewajiban dalam waktu tertentu, dan perjanjian perdamaian untuk memulihkan keadaan semula. Dan Perusahaan asuransi juga perlu adanya lembaga penjamin polis asuransi, yang nantinya akan bertanggung jawab mengembalikan hak-hak pemegang polis tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Cet.ke 5, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 1.
- S. Saatrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 35.
- Mahlil Adriaman, et. al., *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1, (Agam:Yayasan Tri Edukasi Ilmiah,2024), hlm. 123.
- Mahlil Adriaman, et. al., *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet 1, (Padang: CV. Gita Lentera, 2004), hlm. 19
- Titik Tejaningsih,” *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit*”, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia,2015),hlm.1.
- Emmy Panggaribuan Simanjuntak,” *Hukum Pertanggungan, Hukum*

Dagang”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM), hlm.44.

- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 153.
- Abdulkadir Muhammad,Op. Cit., hlm. 166.
- Munir Fuady, “*Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*”,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2017), cetakan VI,hlm.2.
- Gatot Supramono, “*Perjanjian Utang-Piutang*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 10.

Karya Ilmiah

- Ferial Fatimah, dkk,” *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*”, Notarius, Vol.14 No. 2, hlm. 827.
- Evania Larisa, dkk, “*Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*”, Al Qodiri Jurnal Pendidikan,Sosial,dan Keagamaan, Vol. 21 No. 1, April 2023, hlm.18.
- Utiyafina Mardhati Hazhin,dkk, “*Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi*”, NEGARA HUKUM, Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 218.

Internet

Sequis, “Polis Asuransi : Pengertian, Fungsi, dan Isi Polis”, dalam <https://sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/polis-asuransi-pengertian-fungsi-dan-isi-polis> dikunjungi 31 Juli 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
28 Tahun 2015 Tentang
Pembubaran, Likuidasi, dan
Kepailitan Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Resuransi, Perusahaan
Resuransi Syariah.